

Kekuasaan Dan Pembangunan Di Desa Diwek Studi Kasus Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Nasoeka Adiyana Dahlan

Abstrak

Penelitian yang berlokasi di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang bertujuan untuk mengetahui basis empiris penjelasan adanya disparitas pembangunan Desa dari prespektif politik. Penelitian ini membuktikan bahwa disparitas pembangunan terjadi karena ketimpangan akses terhadap kekuasaan pembuatan keputusan, hubungan elite massa dan alokasi kesejahteraan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Dalam hasil penelitian ini penulis menemukan berbagai fakta lapangan yang menunjukkan adanya di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Semua itu terjadi dikarenakan oleh adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata, dan pengaruh elite desa. Dengan adanya Disparitas distribusi kekuasaan, berdampak pada distribusi alokasi ekonomi di desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Kata Kunci: *Disparitas Distribusi Kekuasaan , Alokasi Ekonomi, Pola Hubungan Elite Massa*

Pendahuluan

Disparitas atau kesenjangan wilayah merupakan masalah yang cukup memprihatinkan, proses pembangunan memang lebih mengarah pada daerah-daerah yang dinilai menghasilkan daripada daerah-daerah yang dianggap tidak menghasilkan. Pembangunan yang tidak merata juga dapat menyebabkan disparitas wilayah. Disparitas tidak hanya bisa terjadi di lingkup negara, namun disparitas juga dapat terjadi di desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati. Desa terbagi menjadi beberapa wilayah, yang biasa disebut dengan dusun. Dusun dikepalai oleh kepala dusun, dan disebut juga sebagai “Kamituo”. Terbaginya desa menjadi beberapa wilayah dusun dapat menyebabkan munculnya disparitas. Dalam konteks disparitas yang terjadi di desa mengacu pada disparitas dalam hal pembangunan, lebih fokusnya mengacu pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.

Pembangunan merupakan suatu bentuk usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu. Perubahan-perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan/potensi alam, manusia, dan sosial budaya. Disparitas yang terjadi di desa dapat dilihat dari bentuk fisik, yakni dilihat dari pembangunan yang terdapat di wilayah yang terindikasi disparitas. Jika dilihat dari aspek ekonomi disparitas dapat diukur dengan (a) jenis pekerjaan, (b) tingkat

pendidikan, (c) jumlah penduduk, (d) program-program dari pemerintah. Program-program desa seperti, PNPM (Program Nasional Pengentasan Kemiskinan Mandiri), ADD. PNPM merupakan Salah satu bentuk program yang dibuat oleh pemerintah yang menyentuh sampai tingkat desa adalah PNPM Mandiri. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sedangkan ADD merupakan dana yang bersumber dari APBD kabupaten Jombang yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat desa. Selain PNPM dan ADD banyak sekali program-program pemerintah yang diperuntukkan untuk desa seperti, RASKIN, BLT, JAMKESMAS, JAMKESDA, PUAB. Program-program yang diperuntukkan untuk desa dapat dikategorikan sebagai indikator disparitas. Jika dilihat dari aspek ekonomi indikator disparitas adalah (1)Perbedaan karakteristik limpahan sumberdaya alam (*resource endowment*); 2) Perbedaan demografi; 3) Perbedaan kemampuan sumberdaya manusia (*human capital*); 4) Perbedaan potensi lokasi; 5) Perbedaan dari aspek aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, (6) Perbedaan aspek potensi pasar, dengan (7) jenis pekerjaan, (8) tingkat pendidikan, (9) jumlah penduduk, (10) program-program dari pemerintah sedangkan dari aspek politik untuk mengetahui terjadinya disparitas adalah dilihat dari proses-proses keputusan dan kebijakan yang ada di desa. Di desa, bagaimanapun melaratnya selalu ditemukan orang-orang yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan, atau sering disebut dengan golongan elite.

Golongan elite, karna kondisi yang mereka miliki, baik karena mempunyai kekayaan yang lebih banyak, keadaan jasmani yang lebih kuat, lebih tangguh menghadapi musibah dan lebih menikmati layanan dari luar pemerintahan, sad atau tidak sadar, nyata atau terselubung, mereka sering berindak sebagai pemeras. Pembangunan tidak lepas dari selera kekuasaan. Bagaimana dan kemana distribusi pembangunan harus dibagi tergantung dengan tarik-menarik kekuatan relasi politik dalam konteks dukungan politik. Dengan demikian distribusi pembangunan dilakukan atas pertimbangan pragmatis politik. Hal itu yang menyebabkan pragmatisme menganut dalam pandangan masyarakat karena pemerintah sendiri telah menjadikan program pembangunan sebagai instrument politik, yang secara mudah diterjemahkan ke dalam kemakmuran ekonomi. Sehingga indikasinya bahwa alokasi pembangunan, bukan aspirasi masyarakat, melainkan aspirasi politik, itu bukan menjadi rahasia umum lagi dalam konteks pembangunan saat ini. Dampak Pembangunan telah pula mereduksi kemampuan masyarakat. Sehingga lembaga-lembaga saat ini kurang dapat mengatasi masalah yang ada dalam pembangunan. Sebenarnya dalam pembangunan yang menjadi unsur paling berpengaruh adalah partisipasi masyarakat.

Fenomena disparitas terjadi Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Desa Diwek tergolong dalam desa yang sedang berkembang, ditunjukkan dengan adanya pembangunan di desa Diwek. Di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang terbagi menjadi tiga dusun, yang pertama dusun Diwek, dusun Diwek merupakan dusun yang letak geografisnya cukup strategis terletak di diantara jalan raya jombang-pare, dan untuk dusun ketanon dan kemambang posisinya terletak di barat dan timur dusun diwek. Diantara ketiga dusun tersebut dalam hal pembangunan dusun diwek dapat dikatakan sebagai salah satu dusun yang pembangunannya tertinggal. Fenomena disparitas di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dapat dilihat dari fisik, dari pembangunan

yang ada di desa Diwek. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang menggambarkan terjadinya disparitas pembangunan di tiga wilayah dusun seperti contoh; untuk dusun ketanon jalan akses bagus begitu juga dusun kemambang, banyak program-program yang sarasannya mengacu ke dua dusun itu saja. Itu semua dapat menjadi indikator terjadinya disparitas yang ada di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang jika dilihat dari sudut pandang ekonomi. Jika dilihat dari sudut pandang politik disparitas dapat di lukiskan dengan bagaimana proses-proses pembuatan kebijakan dan keputusan kebijakan yang ada di desa. Seberapa besar pengaruh orang-orang yang ada di desa, pengaruh Kepala Desa, Elit desa, Tokoh Masyarakat desa. Elit desa yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki posisi sosial tinggi di desa. Dalam setiap pembuatan kebijakan desa elit, tokoh masyarakat dan perangkat desa memiliki pengaruh yang cukup besar dan itu yang akan menjadikan disparitas yang terjadi di desa. Disparitas tidak hanya terjadi dalam pembangunannya, disparitas juga terjadi di berbagai sektor yang ada di desa, dan disparitas berdampak terhadap proses-proses yang ada di desa termasuk proses alokasi ekonomi. Fokus kajian penelitian ini adalah disparitas pembangunan desa yang terjadi di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan berhubungan dengan Kepala Desa, perangkat desa, masyarakat.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, peneliti membuat tiga permasalahan penelitian yakni yang pertama adalah Bagaimana distribusi kekuasaan, hubungan elite massa, dan implikasi distribusi kekuasaan terhadap distribusi dan alokasi ekonomi yang terdapat di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Peneliti menggunakan dua teori di dalam studi kepustakaan yang telah penulis buat yang berfungsi untuk menganalisis data wawancara yang diperoleh peneliti di Lapangan.

Teori

Teori yang pertama adalah kekuasaan Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Menurut jenisnya kekuasaan dibagi menjadi 2 yaitu: kekuasaan karena jabatan/posisi dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan posisi/jabatan (position power) didapat dari wewenang formal, besarnya ini tergantung pada besarnya pendelegasian orang yang menduduki posisi tersebut. Kekuasaan pribadi (personal power) berasal dari para pengikut dan berdasarkan pada seberapa besar para pengikut mengagumi respek dan merasa terikat pada pemimpin. Pada masyarakat maju dan mapan baik jabatan maupun kualitas pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber kekuasaan. Sebaliknya pada masyarakat yang sederhana, struktur masyarakat kekuasaan yang didasarkan atas kualitas pribadi tampak lebih menonjol dari pada kekuasaan yang terkandung dalam jabatan.

Menurut Andrain, ilmuwan politik menggambarkan distribusi kekuasaan dalam bentuk tiga model, yakni model elit yang memerintah, model pluralis, dan model populis. Model pertama melukiskan kekuasaan sebagai dimiliki oleh kelompok kecil orang yang disebut elit. Model pluralis menggambarkan kekuasaan sebagai dimiliki oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat dan lembaga dalam pemerintahan. Lalu model populis melukiskan kekuasaan sebagai dipegang, oleh setiap individu warga negara atau rakyat

secara kolektif. Kelompok elit politik dapat digolongkan menjadi tiga tipe. Pertama, elit politik yang dalam segala tindakannya berorientasi pada kepentingan pribadi atau golongan. Elit tipe ini cenderung bersifat tertutup, dalam arti menolak golongan yang bukan elit memasuki lingkungan elit. Diantara esama elit, tipe ini mengembangkan kolaborasi untuk mempertahankan keadaan yang ada. Oleh karena itu, pelapisan politik tidak hanya berbentuk piramid dan hirarki, tetapi juga tidak tanggap atas aspirasi dan tuntutan masyarakat. Elit ini disebut konservatif. Maksudnya, sikap dan perilaku yang cenderung memelihara dan mempertahankan struktur masyarakat yang jelas menguntungkannya. Kelompok elit yang kedua dan ketiga, elit politik liberal dan pelawan elit.

Teori yang kedua adalah teori Patron Client, Keith R. Legg melihat tautan patron klien dibidang politik merupakan bentuk hubungan antara dua orang atau dyadic, yaitu antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Patron sebagai yang lebih tinggi, sedangkan klien sebagai yang lebih rendah. Hubungan patron klien pada umumnya berkenaan dengan penguasaan sumber daya yang timpang. Hubungan yang terbentuk diantara para pelaku atau perangkat para pelaku yang menguasai sumber daya tidak sama. Sumber daya yang tidak sama tersebut bisa mencakup kekayaan, kedudukan, atau pengaruh. Dalam ruang lingkup politik, sumber daya bisa mencakup hak-hak bersifat politik seperti hak pilih, hak perorangan menurut hukum, hak istimewa, dan hak yang berasal dari kewenangan dalam pemerintahan atau sumber daya yang berasal dari sektor non-politik namun telah dialihkan menjadi sektor politik. . Ciri hubungan patron klien yang membedakan dengan hubungan sosial lain. Ciri pertama, adanya ketidakseimbangan (inequality) dalam pertukaran. Ketidakseimbangan terjadi karena patron berada dalam posisi pemberi barang atau jasa yang sangat diperlukan bagi klien dan keluarganya agar mereka dapat tetap hidup. Rasa wajib membalas pada diri klien muncul akibat pemberian tersebut, selama pemberian itu masih mampu memenuhi kebutuhan klien yang paling pokok. Jika klien merasa apa yang dia berikan tidak dibalas sepentasnya oleh patron, dia akan melepaskan diri dari hubungan tersebut tanpa sangsi. dalam hubungan patron klien ini harus didukung oleh norma-norma masyarakat yang memungkinkan pihak yang lebih rendah kedudukannya (klien) melakukan penawaran, artinya jika salah satu pihak merasa bahwa pihak lain tidak memberi seperti yang diharapkan, dia dapat menarik diri dari hubungan itu tanpa sangsi.

Dengan demikian, ketidakseimbangan akan lebih tepat jika dipandang dari sisi kelebihan patron dalam hal status, posisi, kekayaan, sedangkan barang ataupun jasa yang dipertukarkan akan mempunyai nilai seimbang. Hal ini dimungkinkan karena nilai barang atau jasa itu sangat ditentukan oleh para pelaku pertukaran itu, makin dibutuhkan barang atau jasa itu makin tinggi pula nilai barang itu baginya. Ciri kedua adalah sifat tatap muka. Sifat ini member makna bahwa hubungan patron klien adalah hubungan pribadi, yaitu hubungan yang didasari rasa saling percaya. Masing-masing pihak mengandalkan penuh pada kepercayaan, karena hubungan ini tidak disertai perjanjian tertulis. Dengan demikian, walaupun hubungan patron klien bersifat instrumental, artinya kedua belah pihak memperhitungkan untung-rugi, namun unsur rasa selalu menyertai. Ciri ketiga adalah sifatnya luwes dan meluas. Dalam relasi Inl bantuan yang diminta patron dapat bermacam-macam, mulai membantu memperbaiki rumah, mengolah tanah, sampai ke kampanye politik. Klien mendapat bantuan tidak hanya pada saat mengalami musibah, tetapi juga bila mengalami kesulitan mengurus sesuatu. Oengan kata lain, hubungan ini dapat

dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan oleh kedua belah pihak, sekaligus sebagai jaminan sosial bagi mereka.

Metode penelitian

Metode penelitian yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif adalah suatu pengumpulan fakta-fakta dari suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan jelas terhadap suatu keadaan. Penelitian yang bersifat kualitatif ini, informasi didapatkan secara langsung dari informan yang terkait. Dari informan tersebut, data-data yang didapat kemudian akan diolah oleh peneliti. Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/ komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individual dan organisasi. Dalam penelitian ini individual adalah Tokoh masyarakat. Untuk unit analisis organisasi adalah Perangkat Desa, BPD, LMPD. Dalam penelitian ini, dilakukan di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Lokasi penelitian ini ditentukan oleh peneliti dengan sengaja dikarenakan penelitian ini mampu menjelaskan tentang fenomena disparitas pembangunan yang terjadi Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparatur pemerintah desa dan penduduk desa. Dalam penelitian ini diperlukan adanya subjek penelitian, subjek penelitian ini adalah informan. Informan merupakan narasumber yang dapat memberikan sebuah informasi dan penjelasan-penjelasan yang diperlukan peneliti dalam proses penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan oleh peneliti, alasan peneliti menentukan informannya karena informan tersebut dianggap akan mampu memberikan segala informasi yang di butuhkan peneliti. Informan yang dipilih juga merupakan informan yang mengetahui dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini, peneliti dalam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yang dituju. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, memang teknik-teknik pengumpulan data harus dilakukan dengan baik dan teratur. Dalam penelitian kualitatif, data utama adalah dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang terkait dengan penelitian ini. Dengan wawancara secara langsung, peneliti akan mendapatkan data-data utama untuk mampu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan peneliti. Dalam teknik wawancara, peneliti harus terlebih dahulu meminta ijin kepada informan untuk bersedia melakukan wawancara. Dalam proses wawancara, sebaiknya peneliti menyiapkan alat bantu untuk melancarkan kegiatan tersebut. Seperti catatan buku, alat perekam bisa menggunakan handphone. Agar wawancara dapat terkontrol dengan baik, maka peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian agar tidak mengarah kemana-mana. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif: pertama, lebih mudah menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda: kedua, metode ini

menyajikan secara langsung hakekat peneliti dengan subjek penelitian. Teknik analisis data ini bertujuan untuk menyusun data agar tersusun rapi, dimana di mulai dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta kumpulan bahan-bahan yang didapat untuk menunjang penelitian. Selain itu data-data primer dan data sekunder yang di dapat peneliti juga akan menunjang dalam menganalisis data.

Pembahasan

Disparitas yang terdapat di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang terjadi di tiga Dusun, Dusun Ketanon, Dusun Kemambang, dan Dusun Diwek. Dusun Ketanon dan Dusun Kemambang juga terkait kondisi infrastruktur yang cukup mendukung perkembangan wilayah tersebut. Sedangkan wilayah Dusun Diwek, merupakan daerah yang kurang berkembang. Seperti yang telah di paparkan oleh peneliti, di Desa Diwek distribusi kekuasaannya kurang merata. Sehingga semua proses kebijakan dan pengambilan keputusan akan menjadi timpang dan cenderung tidak adil. Itu semua ditunjukkan pada jumlah perangkat Desa yang ada, LMPD, dan juga jumlah BPD yang berada di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Mayoritas perangkat Desa berdomisili di Dusun Diwek, selain tidak ada pemerataan di pembangunan, ketimpangan juga terjadi dalam perangkat desa. Ditunjukkan dengan data yang telah diperoleh menjelaskan bahwa terjadi distribusi kekuasaan yang tidak merata yakni distribusi perangkat desa yang ada di Desa Diwek. Distribusi kekuasaan yang ada di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang menurut peneliti para perangkat desa yang ada kebanyakan hanya condong pada satu dusun saja dan kurang meratanya penyebaran perangkat desa yang dimaksudkan domisili perangkat desa. Namun sebenarnya itu tidak cukup mempengaruhi karena jika melihat data yang didapat dengan jumlah perangkat yang mayoritas berdomisili pada satu dusun saja dalam hal pembangunan dan distribusi pengalokasian program ataupun dana desa, dusun dengan mayoritas perangkat yang banyak malah dapat dikatakan tertinggal.

Sebagai wewenang formal maka seringkali pemerintahan desa hanya dapat menggerakkan masyarakat pada aspek pembangunan fisik saja. Beberapa kekuasaan mengenai tata nilai dan norma perilaku sering masih dikendalikan oleh kekuasaan informal dalam hal ini tokoh masyarakat, agama, dan lain sebagainya. Meski tidak selamanya saling bertentangan, kerap kali program pembangunan terganjal oleh kekuasaan ini. Karena distribusi yang tidak merata dan hanya dikendalikan oleh beberapa orang tertentu. Dengan adanya ketimpangan distribusi maka akan banyak diketahui atau ditemukan apa yang disebut dengan pembatasan informasi atau informasi yang dimiliki oleh beberapa orang tertentu. Dan setiap informasi terkesan terbatas dan hanya untuk sekedar formalitas belaka. Kemudian mayoritas kebanyakan orang Desa ialah selalu percaya dan memiliki pemikiran positif. Sehingga setiap kebijakan apapun yang telah ditetapkan oleh pemerintah, masyarakat Desa selalu menganggap kebijakan tersebut sangat masuk akal dan menguntungkan bagi mereka. Dan hal seperti ini lalu kemudian digunakan oleh para elit Desa sebagai jalan untuk memperlancar maksud dan keinginan mereka. Peneliti mengungkapkan bahwa distribusi kekuasaan di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tidak merata. Karena di dalam struktur kekuasaan yang terdapat pada pemerintahan desa terlihat sejalan. Di situlah kemudian para elite dalam hal ini perangkat desa melihat apa yang diinginkan warganya bukan hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja. Sehingga ketika distribusi kekuasaan tersebut tidak merata maka tak heran ketika setiap pembuatan kebijakan, program-program desa, dan segala sesuatu hal

mengenai desa. Ketika distribusi kekuasaan yang tidak merata tersebut terus berlangsung secara terus dapat mengakibatkan adanya ketimpangan di beberapa sektor yang ada di desa terlebih ke arah pembangunan.

Dalam sebuah tatanan masyarakat pasti terdapat sekelompok kecil elite yang kemudian memiliki kekuasaan. Juga terdapat massa yang tergolong banyak dan tidak mampu atau tidak memiliki kekuasaan. Disitulah kemudian peran elite mempunyai peran yang sangat besar. Di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang hubungan elite massa dapat dikatakan masih kurang karena elite yang terdapat di Desa Diwek sendiri kurang mendapat pengaruh di Desa Diwek sendiri, karena masyarakat menganggap hanya perangkat Desa memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pemerintahan Desa. Peneliti mengartikan bahwa elite di Desa Diwek adalah perangkat yang memiliki kekuasaan. Kelompok elite dalam masyarakat berperan menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menarik keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan yang dipegangnya. Mereka ini ada yang berstatus elite formal maupun elite informal. Dalam konteks pedesaan, elite formal adalah para elite yang mempunyai kedudukan resmi dalam struktur pemerintahan desa, seperti kepala desa, kepala hansip, ketua RW dan ketua RT. Sedangkan elite informal adalah mereka yang mempunyai pengaruh yang diakui sebagai pemimpin oleh sebuah kelompok tertentu maupun oleh masyarakat desa seluruhnya meskipun tidak menduduki posisi resmi dalam pemerintahan desa. Seorang kepala desa, mempunyai kekuasaan dan wewenang yang besar untuk mengatur rakyatnya. Kepala desa adalah patron bagi masyarakat desa. Agar kepala desa mampu mempertahankan kekuasaan dan wewenangnya, ia selalu mencari kekuatan legitimasi kedudukannya dengan cara mengaitkan dirinya dengan pemegang kekuasaan yang lebih tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peran kepala desa demikian besar, yaitu pertama, kepala desa kebanyakan desa mempunyai wewenang yang betul-betul nyata.

Peneliti menemukan peran-pengaruh kuat dari kepala desa, baik dalam hal mobilisasi massa, mengotak-atik struktur pamong desa, dan fungsi anggaran desa masih juga banyak ditentukan oleh kepala desa. Meski ada BPD sebagai pengawas eksekutif desa, justru BPD yang melegitimasi kedudukan kepala desa sehingga kepala desa leluasa memainkan kekuasaan. Peneliti beranggapan bahwa disetiap langkah yang di ambil oleh pemerintah Desa semua terlihat elitis. Walaupun banyak perangkat yang menutupi keberadaan disparitas yang ada di Desa tersebut. Tapi faktanya telah ditemukan oleh peneliti bahwa terdapat banyak ketimpangan terjadi di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Dapat dikatakan pola hubungan elite massa yang ada di Desa Diwek bersifat patron client. Elite memanfaatkan kepercayaan yang di berikan oleh massa, dan massa tidak menyadari hal tersebut karena terdapat imbalan yang telah diberikan oleh elite entah berupa materil maupun non materil. Tapi masyarakat sudah merasa sangat beruntung karena mereka dapat timbal balik dari para elite pemerintah. Seperti pembangunan yang mulai di lakukan di Dusun mereka masing-masing. Walaupun fakta telah membuktikan bahwa sesungguhnya pembangunan di Desa Diwek timpang dan menunjukkan adanya disparitas. Tetapi masyarakat sudah merasa bangga dan merasa bahwa para elite desa mereka sudah memperhatikan nasib masyarakat. Sehingga kepercayaan tersebut tidak disia-siakan oleh para elite Desa untuk melancarkan tujuan mereka. Peneliti menyimpulkan pola hubungan elite yang terdapat di Desa Diwek bersifat elite yang memerintah dimana hanya sosok kepala desa yang mampu mempengaruhi perangkat-perangkat di bawah kepemimpinannya dan masyarakat, jika dikorelasikan dengan Patronklien kedudukan

kepala desa berada di puncak dimaksudkan memiliki kekuasaan tunggal dan hanya terjadi pertukaran antara kepala desa dengan perangkat desa dan tidak terjadi pada masyarakat desa. Implikasi distribusi kekuasaan terhadap alokasi ekonomi di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang itu terlihat dari distribusi kekuasaan yang tidak merata yang terdapat di Desa Diwek itu ditandai dengan yang pertama domilsili dari perangkat-perangkat desa, namun itu sebenarnya tidak lah bisa di jadikan acuan utama dalam melihat implikasi yang ditimbulkan dari ketimpangan kekuasaan terhadap distribusi alokasi perekonomian di Desa Diwek. Alokasi dana yang diperoleh desa dapat dikatakan kurang merata, seperti program-program dari kabupaten, provinsi, nasional yang telah masuk ke Desa pendistribusiannya dalam hal pembangunannya kurang merata. Seperti program pembangunan yang masuk di desa. Ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan alokasi perekonomian inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan, tidak hanya ketimpangan dalam hal fisik saja terlebih pembangunan dan infrastruktur saja, ketimpangan juga terdapat dalam perekonomian dan kesejahteraan di masyarakat Desa Diwek. Dengan data yang telah ditemukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa alokasi ekonomi di Desa Diwek belum terjadi adanya pemerataan dan dapat disimpulkan implikasi dari distribusi kekuasaan tidak merata di Desa Diwek berpengaruh juga terhadap alokasi ekonomi dan pembangunan di Desa Diwek.

Kesimpulan

Dalam penelitian yang berjudul kekuasaan dan pembangunan desa, Peneliti membuat tiga Kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yakni, Distribusi kekuasaan yang tidak merata menjadikan adanya disparitas yang terdapat ada di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Distribusi kekuasaan yang tidak merata oleh para elite yang mempunyai tujuan untuk memperlancar kepentingan elite di desa Diwek. Tidak hanya mengenai ketimpangan yang terjadi karena tidak meratanya distribusi kekuasaan yang ada di Desa Diwek, juga memeengaruhi akses pembuatan keputusan strategid di desa. Kesimpulan kedua. Hubungan elite Desa Diwek bersifat patronase terhadap beberapa para elite tertentu dan bersifat tradisional itu ditunjukkan oleh adanya elite di Desa Diwek yang mampu mengarahkan semua tujuan-tujuan para elite di Desa tersebut dan juga menggiring opini masyarakat Desa agar mampu mengikuti kehendak elite yang ada Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Kesimpulan ketiga dalam penelitian ini yakni Dengan adanya disparitas distribusi kekuasaan yang ada di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang berdampak dengan alokasi ekonomi di Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Di tunjukakkan dengan program-program yang masuk ke desa tidak merata dalam sasaran pembangunannya, seperti program ADD, PNPM mandiri.

Saran

Saran dari Peneliti setelah melakukan penelitian ini adalah setidaknya dilakukan lagi penelitian tentang kekuasaan dan pembangunan Desa. Maksud dari saran ini adalah untuk pengembangan studi tentang kekuasaan dan pembangunan Desa. Dan studi kekuasaan dan pembangunan Desa dapat dikembangkan. Selain itu peneliti memberikan saran dalam melakukan penelitian lapangan, setidaknya peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pencarian data untuk menghubungi informan dahulu dan memahami dahulu data data apa saja yang akan dibutuhkan ketika bertemu dengan informan dan pihak yang terkait dengan kekuasaan dan pembangunan Desa.

Daftar Pustaka

- Baratha, I Nyoman. (1982), *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia.
- Siagian, H. (1983), *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Budiardjo, Miriam. (1977), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia.
- Cahyono, Heru. (2005), *Konflik Elit Politik di Pedesaan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Horrison , Lisa. (2007), *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta, Kencana Perdana Group.
- Knuttila, Murray & Kubik , Wendee. (1987), *State Theories : Classical, Global, and Feminist Perspectives*, Canada, Fernwood publishing Ltd.
- Mantra , Ida Bagoes. (2004), *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Marsh , David & Stocker, Gerry. (2010), *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*, Bandung, Nusa Media.
- Philipus, Ng. & Aini, Nurul. (2006), *Sosiologi dan Politik*, Jakarta , Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. (1992), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gresindo
- Varma , S.P. 2001, *Teori Politik Modern*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Soemardi, Soelaeman. (1984), *Cara-cara Pendekatan terhadap Kekuasaan sebagai Suatu Gejala Sosial di dalam aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa (Ed. Miriam Budiardjo)*, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan.
- <http://www.forumdesa.org/rencana/BukuTOR.pdf> (diakses pada 15 maret 2013 10:49 wib)
Badan Perencanaan Pembangunan Prov. Jawa Timur. Penyusun program Kesejahteraan Masyarakat Daerah di Prov. Jawa Timur